



Perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5% pada tahun 2017 dan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia masih akan menghadapi tantangan perekonomian global hingga 2017 berakhir (Harefa, 2016). Target 5% sebetulnya melambangkan kehati-hatian pemerintah Indonesia terhadap laju ekonomi, mengingat pada tahun 2016 Indonesia menunjukkan performa meyakinkan dengan rerata pertumbuhan 5,04%, bukan tidak mungkin Indonesia mampu menarget angka 5,5% di penghujung tahun (Kaleidoskop Media Keuangan, 2017). Dalam perjalanannya sepanjang tahun 2016, Indonesia mengalami laju pertumbuhan yang signifikan. Dimulai dari diberlakukannya amnesti pajak, hingga *comeback* seorang figur kenamaan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, yang serta-merta menguatkan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Sejak September 2015 hingga tahun 2017 ini, Indonesia juga telah mengeluarkan tidak kurang dari 14 paket kebijakan ekonomi untuk menyokong, serta menambah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut bersifat proaktif, namun juga hati-hati. Tak lupa juga di masa yang akan datang Indonesia harus memperbarui kebijakan moneter, investasi infrastruktur, dan juga yang berkaitan dengan memperkuat iklim investasi. Perlu diperhatikan pula kinerja semua pihak dalam tata keuangan Indonesia untuk tetap dalam kondisi prima dan SDMnya memiliki etos kerja yang tinggi. Api harapan masa depan ekonomi Indonesia memang menyala, namun perlu lebih dari sekedar kebijakan untuk menjaganya tetap terang.

Sukidin, dkk.

PEREKONOMIAN INDONESIA



Sukidin, dkk.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Fakta, Strategi dan Harapan



Penerbit:
LaksBang PRESSindo Yogyakarta
www.laksbangpressindo.com
laksbangpressindo@gmail.com

**PEREKONOMIAN INDONESIA:
Fakta, Strategi dan Harapan**



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

Sukidin, dkk.

Perekonomian Indonesia: Fakta, Strategi dan Harapan



**PEREKONOMIAN INDONESIA:
Fakta, Strategi dan Harapan**

Penulis : **Sukidin, dkk.**

Sampul & Layout : **Bang Joedin**

Cetakan I : **Agustus 2017**

Kode Produksi : **LBP: 08.17.00183**
xxi + 313 hlm. 14,5 x 21 cm.

Penerbit : **LaksBang PRESSindo**
(Member of LaksBang Group)
<http://laksbangpressindo.com>
E-mail: laksbangyk@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-5452-04-8

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.



SELAYANG PANDANG Perekonomian Indonesia: Masa Kini dan Masa Depan

Dr. Sukidin, M.Pd.

Pendahuluan

Ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami gejolak hebat, namun tetap bertahan dan bahkan semakin menguat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif baik ditengah lemahnya ekonomi global dan turunnya nilai komoditas ekspor. OECD pada *annual survey*-nya di tahun 2016 banyak memuji pemerintah Indonesia yang mempunyai kapabilitas mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan serta langkah penting dalam bidang penguatan produksi, peningkatan iklim usaha, dan tindakan pencegahan korupsi. Program pengentasan kemiskinan dan pembangunan beberapa titik infrastruktur juga turut andil dalam *survival* ekonomi Indonesia.

Titik penting kebijakan ekonomi Indonesia ada pada organisasi bank sentralnya, yaitu Bank Indonesia (BI), serta kekuatan pelaksana utama yang berada pada diri seorang

simbol penting, Menteri Keuangan (Menkeu). Baik BI maupun kementerian keuangan bahu-membahu dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tak hanya kebijakan, *action* dari kedua pemangku perekonomian Indonesia ini juga patut mendapat apresiasi.

Dalam ringkasan eksekutif *2016 Indonesian economics annual survey*, OECD memaparkan beberapa faktor kunci Indonesia yang dapat menjadi evaluasi sekaligus apresiasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonominya. Temuan utama OECD dalam hal kebijakan ekonomi makro, khususnya permasalahan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak direspon dengan sempurna oleh pemerintah dengan mengeluarkan penyesuaian anggaran baik di kementerian dan lembaga maupun daerah, serta dengan program utama 2016 yang telah mencetak rekor dalam pelaksanaannya, amnesti pajak (Kaleidoskop Media Keuangan, 2016).

Artikel ini akan membahas lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan seputar ekonomi yang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir, penanganan masalah tersebut, kondisi terkini perekonomian Indonesia, serta kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah sebagai alternatif, baik itu alternative pencegahan masalah, pengakselerasi pertumbuhan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, maupun pengentasan kemiskinan. Indonesia memang menghadapi banyak tantangan dalam perekonomiannya, namun justru tantangan-tantangan itulah yang menjadikan ekonomi Indonesia semakin kuat ditengah krisis dunia.

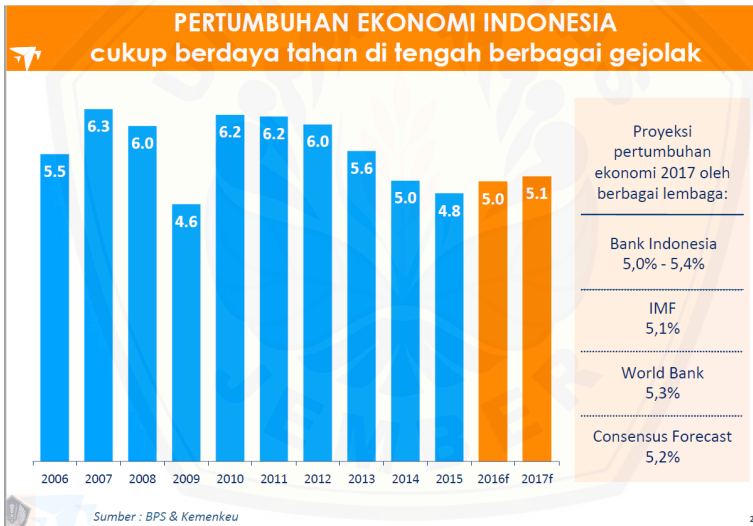
Perekonomian Indonesia Masa Kini

Dalam *annual Banker's Dinner* 2016, Gubernur BI sebagai otoritas moneter menyampaikan pemikiran dan arah kebijakan bank sentral pada 2017, yaitu menggeser kebijakan tahun 2016 yang mengarahkan pada stabilitas moneter, menjadi kebijakan moneter yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (Harefa, 2016). Indonesia sepanjang tahun 2016 sebenarnya memiliki laju pertumbuhan ekonomi 5.04%, namun angka tersebut ternyata lebih rendah daripada target semula yang diperkirakan akan melebihi angka 5,2% oleh APBN-P (Kaleidoskop Media Keuangan, 2017). Selain penggeseran kebijakan, pengangkatan kembali Sri Mulyani sebagai menteri keuangan (Menkeu) oleh presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun (27/07) 2016 menggantikan Bambang Brodjonegoro juga berpengaruh positif pada pertumbuhan IHSG dan menguatkan nilai tukar rupiah. Artinya, pengangkatan seorang figur dapat berpengaruh banyak pada laju perekonomian nasional.

Backtrack sejenak, pada pekan pertama Sri Mulyani dilantik, beliau langsung mengajukan proposal penyesuaian anggaran baik di pusat, maupun transfer daerah (Kaleidoskop Media Keuangan, 2017). Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjaga momentum pergerakan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Penyesuaian tersebut, tentu lebih didominasi oleh pengurangan anggaran, terlebih pada aktivitas kementerian/lembaga yang dianggap tidak betul-betul menunjang prioritas pemerintah, seperti perjalanan dinas dan konsinyering. Pemangkasan anggaran tersebut mencapai Rp 65 triliun di K/L dan Rp 68,8 triliun

di transfer daerah (Kaleidoskop Media Keuangan, 2016). Aktivitas seperti ini diyakini memberikan stigma positif pada perekonomian Indonesia.

Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih banyak menghadapi tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Masalah struktural ada pada perekonomian global, yang penyelesaiannya memerlukan waktu dan tentunya perlu diantisipasi sedini mungkin. Kemampuan adaptasi ekonomi domestik pun harus semakin dioptimalkan agar tidak tersingkir dari kondisi global yang tidak kondusif (Kaleidoskop Media Keuangan, 2017).



Figur 1.1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Sri Mulyani dalam kuliah umum HUT ke-47 Media Indonesia 2017

Berdasarkan figur diatas, laju perekonomian Indonesia mengalami pasang-surut semenjak krisis moneter 2008-2009. Terkini, kondisi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 (5,04%) bila dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3,1% menunjukkan bahwa kelenturan ekonomi domestik banyak dipengaruhi oleh permintaan dari sisi domestik itu sendiri. Realisasi tingkat permintaan domestik tersebut masih dalam kecenderungan meningkat, sehingga dapat meminimalkan dampak menurunnya kinerja sektor eksternal. Menurut Gubernur BI ada tiga fungsi dasar kebijakan publik yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi dampak eksternal tersebut, yaitu fungsi stabilisasi sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, fungsi alokasi untuk menjamin penggunaan berbagai sumber daya sesuai prioritas dan efisien, dan fungsi distribusi untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan (Harefa, 2016).

Dalam tulisannya, Harefa (2016) memaparkan prinsip sinergi menjadi salah satu hal yang perlu dijadikan pedoman untuk menjalankan fungsi tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan harus harmonis dan terintegrasi antar-pemangku kebijakan, baik di pusat maupun daerah, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Mengingat hal tersebut, otoritas moneter dan pengelolaan fiskal senantiasa berusaha mengoptimalkan bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas ekonomi, yang selanjutnya akan menopang fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Penerapan bauran kebijakan fiskal-Moneter (*monetary-fiscal policy mix*) diterapkan untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro secara keseluruhan dan optimal.

Selain penetapan kebijakan-kebijakan baru serta penyesuaian anggaran, Indonesia pada 2016 juga telah menyelenggarakan amnesti pajak. Definisi amnesti pajak diambil dari laman daring direktorat jendral pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah

kepada wajib pajak (WP) meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan. Amnesti pajak terbukti ampuh mendorong perekonomian lebih lanjut bukan hanya karena nilainya yang fantastis, melainkan juga karena adanya rasa percaya pada lembaga negara yang tertanam pada wajib pajak. Dalam Kaleidoskop Media Keuangan Indonesia edisi Januari 2017, presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pada periode pertama amnesti pajak saja, negara sudah mencatat harta tak terlapor senilai 30,88% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan total penerimaan Rp. 97 triliun rupiah. Dibandingkan dengan beberapa negara lain yang telah melakukan amnesti pajak, Indonesia bisa dibilang sukses.

Penerimaan ekstra negara ini menjadi angin segar terutama di sektor riil. Menkeu dalam pidato penutupan *tax amnesty* Indonesia mengatakan bahwa hasil tebusan dan repatriasi amnesti pajak akan disalurkan ke infrastruktur, pelayanan publik, UMKM, serta program pengentasan kemiskinan dan pendorong ekonomi di daerah 3T. Tentu hal ini dapat menjadi batu loncatan ekonomi Indonesia karena rasa percaya yang ditanamkan negara pada pelaku usaha akan berbuah manis tak hanya pada pelaku usaha itu sendiri, namun juga masyarakat Indonesia seluruhnya.

Masih dalam Kaleidoskop Media Keuangan Januari 2017, terdapat beberapa strategi yang dilancarkan pemerintah demi kesuksesan program amnesti pajak ini antara lain dengan mengundang 500 WP *prominent* atau yang lebih familiar dengan sebutan WP potensial, karena masuk

dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes 2015 ke istana negara pada Desember 2016. Presiden pada kesempatan itu terlibat langsung dengan menyampaikan sosialisasi amnesti pajak pada WP *prominent* tersebut. Strategi lain yang telah dilakukan pemerintah adalah mendaftar kepemilikan harta WP *non-prominent* yang nantinya disandingkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) tahunan mereka. Harta tersebut dapat berupa kepemilikan aset, kepemilikan kendaraan bermotor, kapal, properti, saham, obligasi, dan lainnya. Strategi terakhir selain fokus pada persuasi pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) untuk berpindah di sektor formal adalah pendekatan asosiasi profesi. Menkeu dalam seminar HUT ke 11 ikatan banker Indonesia (IBI) mengajak para pelaku usaha, komisaris, dan direksi-direksi perbankan untuk segera menggunakan haknya mengikuti amnesti pajak dan berkontribusi positif pada negara.

Penetapan kebijakan-kebijakan strategis dan amnesti pajak setahun terakhir memperkuat perekonomian Indonesia dan membuat ia dapat bertahan di tengah gejolak perekonomian dunia. Terbukti walaupun di pergantian tahun 2017 perekonomian dunia melambat akibat krisis di Tiongkok, Indonesia tetap *survive*, bahkan pada figur 1.1 pertumbuhannya naik 0.2% di pergantian tahun. Selain itu, Indonesia juga masih termasuk dalam berbagai organisasi ekonomi dunia seperti APEC, WTO, G-20, dan masih banyak lagi. PDB Indonesia juga masuk dalam peringkat 15 dunia. Ditambah dengan struktur angkatan kerja Indonesia yang 60% dalam usia produktif. Fakta-fakta inilah yang membuat ekonomi Indonesia semakin kuat.

Indonesia mungkin memang dapat bertahan, namun kemampuan perekonomiannya untuk tetap maju di masa mendatang masih menjadi pertanyaan. Resesi ekonomi Tiongkok dan Eropa yang merambah dunia, harga komoditas ekspor yang stagnan, serta tidak meratanya infrastruktur di setiap daerah menjadi isu konkrit yang harus ditelaah dan diatasi, bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga seluruh rakyat Indonesia.

Paket Kebijakan Pendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan strategis dan amnesti pajak, Indonesia dalam tahun fiskal 2016-2017 sebenarnya mengalami kenaikan produktivitas. Apresiasi rupiah meningkat, PDB meningkat, pertumbuhan ekonomi juga terkontrol sebesar 0.2%. Namun yang perlu dicatat di sektor fiskal adalah naiknya *fed fund rate* (FFD) yang diakibatkan naiknya Donald Trump sebagai presiden Amerika, ini menyebabkan suku bunga acuan *The Fed* meningkat dan sebagai akibatnya akan banyak modal keluar dari Indonesia. *Current Account Deficit* (CAD) tahun 2017 atau defisit transaksi yang meningkat 0.5% dari PDB mengindikasikan bahwa Indonesia sudah terlalu banyak mengimpor. Naiknya CAD jika disinkronkan dengan naiknya aktivitas ekonomi sebenarnya tidak menjadi masalah, namun akan menjadi pertanyaan apabila aktivitas ekonomi tidak menambah secara signifikan (Agung, 2016). Selain itu menurut Agung (2016), pada sektor riil harga komoditas ekspor yang stagnan bahkan cenderung menurun juga menjadi isu yang harus segera diatasi. Mendorong laju pertumbuhan Indonesia memang mungkin, namun akan menjadi pertanyaan besar apabila Indonesia tidak dapat

menyelesaikan masalah perekonomiannya dengan tepat.

Untuk mengatasi permasalahan diatas dan juga mem-*boost* perekonomian Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan strategis. Prioritas pertama pemerintah adalah penyuksesan amnesti pajak. Disamping empat strategi utama kementerian keuangan dan presiden, BI juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan amnesti pajak diantaranya memperkuat strategi pengelolaan cadangan devisa, operasi moneter (OM), menambah instrumen *hedging* (lindung nilai) bagi investor-investor asing, menambah variasi outlet investasi di pasar uang, serta diterapkannya kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit dan mengelolanya agar tidak terjadi *credit bubbles*.

Prioritas kedua adalah penyelesaian isu global seperti naiknya FFD, CAD, dan juga meminimalisir dampak resesi ekonomi global yang sedang terjadi di Eropa dan Tiongkok. Dalam hal ini pertama, pemerintah perlu meningkatkan ketahanan fiskal dan mempertajam belanja negara pada APBN 2016. Penyesuaian APBN menurut staf ahli menteri bidang sinergi ekonomi dan pembiayaan, Bambang Prijambodo (2015) juga dipandang perlu karena selain nilai tukar rupiah yang *volatile*, APBN tiap tahun diprediksi akan semakin naik seiring dengan banyaknya aktivitas ekonomi. Menkeu dalam hal ini telah memangkas APBN-P sebesar Rp 65 triliun di K/L dan Rp 68,8 triliun di transfer daerah. Kedua, kemampuan penyerapan dana-dana daerah juga harus ditingkatkan karena menurut Prijambodo, penumpukan di pemda masih terjadi, dan penumpukandana berarti memberi celah pada korupsi. Ketiga, Pemantauan juga perlu diarahkan pada berbagai potensi krisis yang

dapat terjadi di berbagai kawasan yang dapat memicu pergerakan arus modal serta menimbulkan efek menular (*contagious effect*) termasuk ketidakpastian ekonomi Cina. Stabilitas harga barang dan jasa perlu ditingkatkan dengan menjaga pasokan barang dan jasa secara memadai terutama komoditas bahan pokok. Penurunan *administered price* perlu dilakukan secara proporsional untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi beban biaya dunia usaha (Priyambodo, 2015).

Prioritas ketiga menurut Priyambodo adalah terus memperbaiki iklim investasi. Kenaikan investasi di Indonesia cenderung melambat. Selain oleh karena berkurangnya arus investasi ke *emerging economies*, daya tarik investasi Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dalam tahun 2015, ranking Indonesia naik menjadi 109 dalam *Ease of Doing Business* dari 189 negara. Ranking Indonesia dalam *Global Competitiveness Index* juga membaik dari urutan 38 (dari 188 negara) pada tahun 2013 – 14 menjadi urutan 34 (dari 184 negara) pada tahun 2014 – 2015. Meski ranking Indonesia dalam EODB meningkat dari urutan 114 pada tahun 2014, peringkat Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN dan bahkan Vietnam dan Filipina (masing-masing ranking 90 dan 103). Ini yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia, mengeluarkan kebijakan yang positif bagi kemudahan berinvestasi.

Prioritas keempat adalah meningkatkan daya saing ekspor dan diversifikasi pasar ekspor. Peningkatan daya saing perlu dilakukan untuk mengimbangi perlambatan ekonomi dunia terutama negara-negara di luar Amerika Serikat. Daya saing ditingkatkan dengan mengurangi berbagai kendala yang menghambat arus barang dan jasa,

termasuk peraturan-peraturan daerah yang menghambat, dan prosedur kepabeanan. Diversifikasi pasar komoditi ekspor perlu diperluas dengan mencari pasar baru termasuk di Asia, Amerika Latin, dan Afrika yang relatif tidak terlalu terkena pengaruh perlambatan ekonomi meskipun pertumbuhannya relatif rendah. Langkah-langkah yang cepat dan terencana perlu ditempuh dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai sejak akhir tahun 2015 (MEA 2015) baik dalam memanfaatkan peluang yang tersedia bagi pasar yang semakin luas maupun dalam melindungi pasar domestik termasuk di sektor jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil (Priyambodo, 2015).

Prioritas terakhir menurut Priyambodo adalah meningkatkan penyaluran kredit perbankan. Penyaluran kredit perbankan ditingkatkan dengan mendorong intermediasi perbankan terutama pada kegiatan investasi dan produksi. Dengan relaksasi suku bunga acuan dan perbaikan iklim investasi, permintaan kredit diharapkan meningkat.

Pada masa yang akan datang, Indonesia juga perlu menargetkan struktur ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Maka dari itu menurut Agung (2016) pemerintah perlu melakukan tiga paket kebijakan utama, yaitu reformasi ekonomi, penjagaan momentum pertumbuhan, dan memperkuat titik-titik yang dirasa memiliki daya saing global. Reformasi ekonomi telah ditempuh pada 2016-2017 dengan penunjukan Menkeu baru dan diberlakukannya program amnesti pajak. Sedangkan kebijakan-kebijakan untuk penjagaan momentum seperti memelihara stabilitas moneter, optimalisasi amnesti pajak, dan akselerasi struktural harus dimulai di tahun 2017 ini juga. Setelah terlewati, barulah pemerintah bisa membidik dan mem-

pertajam area-area yang mempunyai daya saing global.

Paket kebijakan tak lebih penting daripada *action* seluruh pihak yang terlibat dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan hanya petunjuk atau sekedar *guideline* agar supaya pelaku ekonomi tidak keluar jalur. Kebijakan juga menjadi sarana pemersatu tujuan pelaku ekonomi Indonesia agar semakin kuat menghadapi tantangan global.

Kesimpulan

Ekonomi Indonesia masa kini masih tak lebih dari strategi untuk bertahan hidup atau *survive* ditengah-tengah krisis dunia dan ketidakpercayaan publik pada pemerintahan. Karena itulah, arah-arrah kebijakan untuk masa kini harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir dampak resesi global dan mengembalikan rasa percaya rakyat Indonesia pada pemerintahannya. Keputusan untuk mengganti Menkeu Indonesia dari Bambang Brodjonegoro menjadi Sri Mulyani Indrawati serta keberanian pemerintah Indonesia untuk melakukan amnesti pajak dapat disimpulkan sudah sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan isu masa kini.

Sedangkan untuk menyambut masa depan perekonomian Indonesia, pemerintah perlu memilah isu berdasarkan beberapa prioritas, dimana prioritas pertama yang harus segera diselesaikan adalah menyukseskan program-program pemerintah masa kini seperti amnesti pajak dan penyesuaian APBN. Prioritas-prioritas yang lain seperti perbaikan iklim investasi, peningkatan daya saing ekspor, dan juga penguatan struktur ekonomi tentu akan mengikuti seiring dengan selesainya satu prioritas.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dan kekayaan itu sejak lama menjadi aktivitas ekonomi utama di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi disini jika hanya bermodal sumber daya alam saja, Indonesia tak akan menjadi *power house* yang disegani di ASEAN, Asia, bahkan di dunia. Indonesia juga perlu memaksimalkan sumber daya manusianya untuk bisa *survive* dan bersaing secara global.

Daftar Rujukan

- Agung, J. (2016). *Perkembangan Perekonomian Indonesia Terkini, Prospek, dan Respon Kebijakan*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Bank Indonesia. (2015). “Tantangan, Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Indonesia.” *BI: Laporan Perekonomian Indonesia 2015*. Diunduh 10 Juli 2017 dari: http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan_tahunan/perekonomian/Documents/6_Bagian_IV.pdf
- Harefa, M. (2016). “Penguatan Ekonomi Domestik.” *Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 8:23; p13-p16
- Indrawati, S. M. (2017). “Prospek Perekonomian Indonesia 2017.” *Materi Kuliah Umum HUT ke-47 Media Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- IPB. (2011). *Gambaran Umum Kondisi Perekonomian Indonesia dan Program KUR*. Bogor: IPB Publishing.
- Jati, G. P. (2016). *Jokowi: Negara Lain Takut dengan Tax Amnesty Indonesia*. CNN Indonesia. Diunduh

10 Juli 2017 dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160714152141-78-144752/jokowi-negara-lain-takut-dengan-tax-amnesty-indonesia/>

Kementerian Keuangan Indonesia. (2017). *Kaleidoskop Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Indonesia. 8:112.

OECD. (2016). *Survey Ekonomi Indonesia oleh OECD*. OECD Economic Surveys Indonesia 2016. Diunduh 10 Juli 2017 dari: www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-indonesia.htm

Prijambodo, B. (2015) *Perekonomian Indonesia Tahun 2016: Prospek dan Kebijakan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.



Daftar Isi

| | |
|--|------------|
| Selayang Pandang Perekonomian Indonesia: Masa Kini dan Masa Depan Dr. Sukidin, M.Pd..... | v |
| Daftar Isi | xix |
| Peran Perbankan dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Ima Muslimatul Khasanah dan Siti Mukharomah | 1 |
| Kebijakan Energi Listrik di Indonesia M. Dilif Lailun Ni'am Westin Mahesti dan Ayu Putri A..... | 19 |
| Analisa Kebijakan Impor Cabai Kering Terhadap Stabilitas Harga Cabai Lokal di Indonesia Dewi Krisnawati dan Ari Yustika Setyowati..... | 35 |
| Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan di Indonesia Desi Wulandari dan Siti Nurhasanah | 47 |

| | |
|--|-----|
| Indonesia dalam Menghadapi ACFTA (ASEAN – <i>China Free Trade Agreement</i>) | |
| Fitra Yurisma Kanti, Lingga Asni Maulina, dan Shelvy Putri Astuti..... | 65 |
| Optimalisasi Kebijakan Infrastruktur dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Indonesia | |
| Mohammad Riki Efendi, Istiqomatul Lailatufa, Fina Nihayatul Khusna..... | 79 |
| Analisis Kebijakan Perbankan untuk Meningkatkan Liquiditas | |
| Febri Haris Putra Wardana W dan Hilmi Ichwa Salam | 99 |
| Strategi Mengatasi Masalah Pengangguran dan Kemiskinan di Pedesaan | |
| Lujeng Shahadatus Safia, Devi Wahyuni Lugita dan Indah Samiasih | 115 |
| Keunggulan Komparatif Produk Indonesia dalam Menghadapi <i>Asean Economic Community</i> (AEC) | |
| Fina Alfiani dan Choirun Nida W | 133 |
| Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | |
| Badiatul Hasanah dan Fajriatul Ngawiyah..... | 151 |
| Kebijakan Privatisasi dan Kinerja BUMN | |
| Anny Istiqomah dan Annisa Sari Surya Hanif..... | 165 |
| Kebijakan Penanaman Modal Asing untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia | |
| Dimas Angga Afrianto dan Mohammad Nasrul Huda..... | 183 |

| | |
|---|-----|
| Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia | |
| Sri Wahyuni DR, Ferry Adi P, dan Umu Syaidah | 205 |
| Strategi Pemerintah untuk Mencapai Swasembada Beras | |
| Hadi Sasmito dan Andika Irawan | 221 |
| Pembangunan Pertanian dan Kedaulatan Pangan di Indonesia | |
| Santi Yulia Citra, R. Ayu Amalia dan Wirdatun Hasanah | 237 |
| Strategi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kelautan di Indonesia | |
| Kresnanda Priyawan, Shofiyah dan Indah Haqiqi | 251 |
| Peran Teknologi Terhadap Perkembangan Industri Manufaktur di Indonesia | |
| Siti Nur Cahyanik, Nur Laili Latifatul Hidayah, dan Suci Ristianingsih | 269 |
| Kebijakan Ekonomi Pariwisata dan Perkembangan Industri Wisata di Indonesia | |
| Umi Mahmudah, Siti Arifatun N., dan Annisa Muntavida M. | 285 |
| Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional | |
| Alvin Efendi Khoirul Ulum dan M. Ainul Fadlol | 299 |